

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS CIPTA KARYA, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

(Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
Kalimantan Selatan)

Muhamad Zuhriansyah

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD terkait dengan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. *Key informan* pada penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru, Kepala Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan, Camat Pulau Laut Utara, Kepala Desa Baharu Utara, Para Ketua Rukun Tetangga Desa Baharu Utara dan Masyarakat Desa Baharu Utara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan reduksi data, display data, dan konklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD terkait dengan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan secara konvensional dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang dengan tahapan sosialisasi oleh Bappeda mengenai pelaksanaan Musrenbang sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang merupakan input dalam perencanaan pembangunan. Tahap berikutnya adalah dilaksanakannya Musrenbangdes yang memuat usulan dari masyarakat desa, yang hasilnya akan masuk ke dalam Musrenbang Kecamatan. Kemudian Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan akan hadir dalam forum SKPD untuk rekonsiliasi usulan yang ada dengan petugas kecamatan agar usulan dipilah dan diteliti secara teknis agar tidak tumpang tindih dengan program yang akan dilaksanakan di kabupaten atau usulan itu sudah masuk dalam APBDesa, atau gapura saajaan atau CDCSR atau yang lainnya. Hasilnya akan masuk dalam Musrenbang Kabupaten yang hasilnya tertuang dalam KUA-PPAS. Hasilnya akan diperiksa oleh DPRD Komisi 3 dan kemudian dibuat RKA yang akan menjadi Raperda APBD. (2) Hal yang tidak terlepas dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam anggaran terutama terkait dengan program pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru adanya proses bargaining (tawar-menawar) karena adanya berbagai tuntutan yang muncul dan bisa saja bentrok karena keterbatasan pendapatan daerah, misalkan adanya program inisiatif kepala daerah dengan usulan bawaan dari anggota legislatif hasil dari kegiatan reses atau jaring asmara yang mereka lakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi aspirasi masyarakat adalah adanya keterbatasan anggaran, kepentingan politik, dan kualitas usulan.

Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, APBD

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menerapkan prinsip otonomi daerah dengan penekanan pada pemerataan dan keadilan, pemberdayaan masyarakat, serta penghargaan terhadap potensi dan keanekaragaman lokal, maka sudah

seharusnya mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan perubahan yang mendasar. Pendekatan yang bersifat *bottom-to-top* haruslah menggantikan model pendekatan *top-to-down* yang selama ini diterapkan atau adanya perubahan

pendekatan dari paradigma *state centered* menjadi *people centered*.

Aspirasi masyarakat yang menggambarkan kepentingan masyarakat tertuang dalam musrenbang desa yang kemudian disaring di musrenbang kecamatan dan kabupaten. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang tinggi, namun kepentingan masyarakat yang tertuang dalam musrenbang sendiri tidak jelas berapa jumlahnya yang masuk dalam APBD.

Pemerintah daerah setiap tahun anggaran mengajukan RAPBD kepada DPRD yang berisi semua usulan program dan kegiatan berdasarkan usulan masing-masing satuan kerja. Usulan itu disertai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan. DPRD pada dasarnya mempunyai cukup waktu untuk mengkaji dan mempertimbangkan secara matang terhadap usulan tersebut agar RAPBD yang diusulkan perlu dibahas dan disahkan menjadi APBD harus benar-benar selaras dengan aspirasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua usulan kegiatan tidak melebihi kemampuan penerimaan yang dapat dicapai, agar tidak terjadi defisit anggaran, sambil memperhatikan fungsi alokasi anggaran, distribusi anggaran, dan stabilisasi anggaran. Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru berdasarkan APBD Tahun 2013 menunjukkan anggaran belanja sebesar Rp. 88.582.385.573,00 dengan anggaran pemasukan sebesar Rp. 471.290.000,00 yang artinya terdapat defisit sebesar Rp. 88.111.095.573,00. Dengan besarnya pengorbanan terkait dengan segala program yang ada dalam SKPD tersebut, maka sudah seharusnya yang dianggarkan tersebut menjadi anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat yang mewakili aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan terkait dengan Desa Baharu Utara Kecamatan

Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan?

3. Tinjauan Pustaka

Pengertian Aspirasi

Willmore dalam Hardojo (2008 : 160) mengidentifikasi 4 tipologi proses bagi pengintegrasian partisipasi warga dalam penyusunan anggaran. Partisipasi tersebut bisa didorong oleh Negara (*top-down*) maupun masyarakat sipil (*bottom-up*) baik melalui parlemen maupun tanpa parlemen (*participation that by-pass parliament*). Warga dan masyarakat sipil belum mempunyai cukup kapasitas untuk mendorong perluasan partisipasi warga dalam prosedur formal tersebut atau, jika hambatan partisipasi dalam prosedur formal tersebut terlalu kuat, untuk membangun mekanisme tanding bagi suatu proses penyusunan penganggaran yang lebih partisipatif (Hardojo, 2008 : 161-162).

Menurut Nazaruddin (2005 : 1) karena APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan, maka harus mencerminkan suatu kesatuan sistem perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitan/benang merahnya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masyarakat adalah sekelompok orang memiliki perasaan sama atau menyatu satu-sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suharto, 2006 : 47). Sementara Mayo dalam Suharto (2006 : 39) mendefinisikan masyarakat dalam dua konsep, yaitu :

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan
2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang

tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Miriam Budiarto (2005) mengutip pendapat Harold J. Laski, bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.

Berdasarkan fungsinya, maka masyarakat berfungsi sebagai penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik (Suharto, 2006 : 47). Masyarakat dalam konteks pembangunan merupakan unsur utama, oleh sebab itu aspirasi masyarakat menjadi hal paling dasar yang harus diserap agar pembangunan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan terarah. Tanpa adanya aspirasi masyarakat maka pembangunan akan bermakna ganda : *Pertama*, sebagai ajang tipu daya elit kepada masyarakat. *Kedua*, sebagai perwujudan demokrasi palsu, sebab pembangunan tidak lebih sebagai gagasan dan kepentingan elit belaka. Secara definitif, konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat mana pun. Di tingkat peran dalam struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan (Amirudin, 2003 : 3).

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa Inggris 'aspiration' berarti cita-cita. Aspiration menurut kata dasarnya, aspire berarti cita-cita atau juga berkeinginan Echols (1983:41). Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua

orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup, Hurlock (1974:265) menyatakan setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang.

4. Metode Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif serta dengan jenis deskriptif. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya fenomena.

Penelitian ini dilakukan di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk memperoleh data dan informasi yang sangat diperlukan bagi penelitian kualitatif ini diperlukan informan kunci pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Kepala Bidang Permukiman Dinas Cipta karya, Permukiman dan Perumahan.
4. Kepala Desa Baharu Utara.
5. Camat Pulau laut Utara.
6. Para Ketua RT di Desa Baharu Utara
7. Masyarakat desa Baharu Utara

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti berperan sebagai instrumen penelitian, selain itu perlu juga dijelaskan alat bantu apa yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini alat bantu pengumpulan data adalah fotografi, dokumen, dan perekam suara.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara.
2. Studi kepustakaan
3. Dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992:15-20), terdiri atas 3 komponen analisis, yaitu :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data atau Display Data
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)
2. Keteralihan (*transferability*)
3. Ketergantungan (*dependability*)
4. Kepastian (*confirmability*)

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penyerapan aspirasi masyarakat ke dalam anggaran, terutama yang masuk ke dalam anggaran kegiatan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru, selain dari pembahasan dalam Musrenbang, namun juga terkait bagaimana aspirasi tersebut dapat tembus dalam pembahasan RAPBD dengan pihak legislatif adalah keterbatasan anggaran, kepentingan politik, dan kualitas usulan, hal ini lah yang menyebabkan munculnya *bargaining* dalam pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legislatif.

1. Keterbatasan Anggaran
Terkait hal ini, maka dilakukanlah penganggaran yang baik. Karena jika tidak dilakukan dengan baik, maka anggaran akan “jebol”. Hal ini pula yang menyebabkan adanya aspirasi masyarakat yang berupa usulan bisa saja tidak masuk dalam penganggaran.
2. Kepentingan Politik
Dalam *bargaining* yang dilakukan oleh legislatif tidak terlepas adanya kepentingan politik. Misalkan adanya *lobby* dari anggota legislatif untuk meng-*goal*-kan suatu usulan kegiatan tertentu karena usulan tersebut merupakan usulan dari Dapil yang bersangkutan pada waktu dilakukan Pemilu yang tentunya akan memberikan keuntungan politis bagi anggota legislatif tersebut.
3. Kualitas Usulan
Kualitas usulan ini terkait dengan

perbedaan (*gap*) antara kebutuhan dengan keinginan. Hal ini tergambarkan pada antara lain pada program pada SKPD Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru melalui dana APBD antara lain sebagai berikut.

Segala program yang dijalankan yang masuk dalam anggaran terutama dalam SKPD Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru tidak lepas dari Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang ditetapkan oleh Kabupaten Kotabaru, dimana hal tersebut ditujukan untuk tercapainya visi Kabupaten Kotabaru melalui Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RKPD dan KUA Kabupaten Kotabaru dengan jalan :

1. Menata pemerintahan dan profesionalisme personal dalam sistem Pelayanan Publik guna Efektifitas Kerja Pemerintah
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang efektif dan efisien dan aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang bersih, berwibawa dan memiliki kompetensi dan profesionalisme.
2. Mendorong iklim demokrasi yang berwawasan dan integritas kebangsaan dalam lingkup iklim reformasi pembangunan dan globalisasi.
Misi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, selaras, seimbang antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan sektor swasta serta membina hubungan dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah lain dan Internasional.
3. Memberdayakan setiap potensi dan peluang yang ada baik fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan rakyat.
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta komponen masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam proses pembuatan keputusan dan memecahkan masalah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat.
4. Memfasilitasi setiap masyarakat dan tuntutan perubahan dalam pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas.
Misi ini bertujuan untuk : (1) Meningkatkan kemampuan keuangan

daerah dengan menciptakan iklim investasi baik lokal, regional maupun internasional dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi guna optimalisasi pelayanan publik dan proses pembangunan dalam skala-skala, dan (2) Meningkatkan pembangunan terutama sarana umum dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kontinuitas serta nilai kedaerahan yang bermartabat.

Pembahasan

Aspirasi merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Terkait hal tersebut, program yang tertuang dalam SKPD Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru yang dihasilkan dari jenjang tahapan mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, hingga disahkan menjadi Perda APBD dan Perbup APBD merupakan bentuk pendekatan bottom up dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini tentu saja tahapan-tahapan penyerapan aspirasi tersebut sehingga menjadi program yang sudah ada anggarannya harus dilalui dengan benar sehingga Perda APBD benar-benar merupakan anggaran yang pro rakyat. Hal inilah yang menjadikan Kabupaten Kotabaru terbaik 1 dalam hal penyusunan RKPD (kue pembangunan) se-Kalimantan Selatan dan mewakili Kalimantan Selatan dalam tingkat nasional. Hal ini karena konsistennya tahapan sistematis yang antara lain :

1. Input

Usulan masyarakat (aspirasi) lahir dari musyawarah warga bersama pemuka adat atau tokoh masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga yang terwakilkan melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Baharu Utara yang disampaikan pada saat musrenbang desa yang dihadiri kecamatan dalam hal ini Camat dan Kasi PMD, Fasilitator PNPM, tokoh adat dan tokoh masyarakat (mewakili masyarakat) dengan telah dilakukan pemilahan berdasarkan sumber pembiayaan yaitu CD/CSR, PID, Dana Alokasi Desa (DAD), itu nantinya masuk dalam APBDesa termasuk juga Gapura Saijaan,

APBD Kabupaten (merujuk kepada SKPD pelaksana dalam hal ini Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru

2. Sosialisasi

Masyarakat atau tokoh masyarakat/pemuka adat, petugas kecamatan kasi PMD atau camat, fasilitator PNPM sudah dibekali oleh Bappeda melalui sosialisasi untuk teknis pemilahan usulan, apakah usulan ke kabupaten dg sumber dana APBD kabupaten, atau ke perusahaan dengan CD/CSR-nya, apakah ke APBDesa dengan sumber dana DAD, atau masuk dalam Gapura Saijaan atau masuk dalam PNPM, pamsimas (Dana APBN).

3. Musrenbang Desa

Dalam musrenbang desa sudah dipilah dari usulan/aspirasi masyarakat berdasarkan prioritas yang telah dicantumkan sumber dananya berdasarkan kebutuhan dan bukan lagi keinginan, misalnya dari 20 usulan yang ada akan terangkang berdasarkan prioritas dan sumber dana, yang tidak dicantumkan sumber dana atau urutan terbawah itulah keinginan.

4. Musrenbang Kecamatan

Setelah musrenbang desa dilanjutkan lagi dalam musrenbang kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan pemilahan atau koreksi kembali bersama dg tim musrenbang kabupaten, petugas kecamatan (kasi PMD) dan fasilitator PNPM berdasarkan sumber dana dan prioritas, hasil dibawa ke kabupaten untuk diverifikasi atau dipilah disesuaikan dengan RKPD dan visi misi (RPJMD) yang selanjutnya akan dalam renstra SKPD Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru.

5. Forum SKPD

Dalam forum SKPD seluruh SKPD yang menjadi tempat usulan atau pencantuman usulan Musrenbang hadir untuk melakukan rekonsiliasi antara petugas kecamatan dengan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru. Di dalam forum SKPD ini usulan akan dipilah dan diteliti secara

teknis agar usulan tidak tumpang tindih dengan program yang akan dilaksanakan di kabupaten atau usulan itu sudah masuk dalam APBDesa, atau gapura saijaan atau CDCSR atau yang lainnya dan hasilnya dituangkan berita acara berupa kesepakatan antara fasilitator kecamatan dengan SKPD Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru.

Selanjutnya setelah forum SKPD didapat usulan yang siap dicantumkan dalam Renja SKPD Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru yang akan dituangkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) atau RKPA (Rencana Kerja Perubahan Anggaran) apabila dilakukan pada saat pertengahan tahun. Renja dan RKA SKPD disampaikan kembali kepada Bappeda yang kemudian akan dicantumkan dalam PPAS.

6. Musrenbang Kabupaten

Dihadiri oleh Bappenas, Bappeda Provinsi, Perusahaan (CDCSR), legislatif, eksekutif yaitu bupati dan seluruh SKPD, LSM, tokoh masyarakat, dalam Musrenbang tersebut dipaparkan lagi hasil-hasil musrenbang desa dan kecamatan yang telah dipilah sehingga mana yang masuk pelaksanaannya oleh CDCSR (perusahaan) mana yang masuk APBN melalui Bappenas dan Bappeda Provinsi dan mana yang masuk dana APBD Kabupaten melalui SKPD terkait dalam hal ini Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru.

Setelah pemantapan melalui tahapan-tahapan di atas didapatkan hasilnya yang tertuang dalam KUA-PPAS dan kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan dalam pembahasan ini juga hanya pengecekan kembali oleh komisi 3 DPRD yang membawahi SKPD Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru yang di dalam komisi tersebut anggota DPRD yang membawahi dapil pengusul mengecek kembali usulan masyarakat tersebut, tercantum atau tidak ataupun volume berubah dapat dijelaskan SKPD Dinas Cipta Karya, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Kotabaru berdasarkan hasil forum SKPD.

Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar), Unibraw Malang.

6. Kesimpulan

Penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD lebih optimal dilaksanakan dengan melalui Musrenbang dan forum SKPD model face to face (berhadapan) dan persuasif sehingga usulan dari bawah (bottom up) lebih berkualitas dan terarah.

Disarankan perlu dilakukan pelatihan di masyarakat terutama kepada Ketua RT untuk menginventarisir kebutuhan pembangunan di wilayahnya agar setiap kegiatan Musrenbang, usulan bisa lebih berkualitas.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 1998. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Tipologi Penelitian, dan Strategi Pemanfaatannya*, FIA UNIBRAW, IKIP, Malang.
- Abe, Alexander, 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pondok Edukasi, Solo.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Holt Rinehart and Winston.
- Bryant, Corralie, Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Cohen, John dan Norman T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation: Concepts, Measures for Project Design*, Development Monograf number 2. Rural Development Committee Center for International Studies, Cornell University.
- Darudono, Dodot, 2002. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pendukung Pembangunan Desa (Sustu Studi di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar)*, Unibraw Malang.
- Dunn, William, N, 2000. *Public Policy Analysis: An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- Dusseldorp, D.B.W.M. and J.M. Van Staveren. 1980. *Framework for Regional Planning in Developing Countries*. Netherlands: International Institute for Land Reclamation and Improvement.
- Dye, Thomas, R, 1972, *Understanding Public Policy*, Prentice hall, Inc, Englewood Cliffs, New jersey.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Texas A & M University, Congressional Quarterly Press.
- Grindle Merilee S. dan Thomas. John W 1991. *Public Choices and Policy Change*. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London
- Goulet, Denis. 1989, *Participation in Development : New Avenue*, World Development, Vol. 17 No. 2.
- Hoessein, Benyamin. 1998. *Otonomi dan Pemerintahan Daerah: Tinjauan Teoritik, dalam R. Siti Zubro: Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan*, PPW-LIPI, Jakarta.
- Huntington, Samuel, P. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.

- _____. 2004. *Membangun Masyarakat Partisipatif*. Dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.
- Jenkins, W.I., 1978. *Policy Analysis*, Martin Robertson, Oxford.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Terjemahan Ricky Ismanto. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertimbangan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Korten. D.C & Sjahrir, 1987. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, yayasan obor Indonesia.
- Lineberry, Robert L. 1978. *American Public Policy*, Harpen Z. Row, New York.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman 1987. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Moekijat. 1993. *Teori Komunikasi*, Mandar Maju. Bandung
- Mubyarto, 1996, *Membina Ilmu Ekonomi Pertanian*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta.
- Muluk, Khairul, M.R, 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing Malang.
- Nasution Zulkarimen, 2004. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990. *Pembangunan Masyarakat mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nogroho Iwan & Rochmin Dahuri. 2003, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES Jakarta.
- Peter Hagul, 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Yayasan Dian Desa Yogyakarta.
- Rahardjo, M. Dawam. 1988. *Mulai Berguru Dari Rakyat*, dalam Robert Chambers : *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Terjemahan Pepep Sudradjat, LP3ES, Jakarta.
- Riggs, F.W. 1988. *Administrasi Negara Berkembang, Teori Masyarakat Prismatic*, Terjemahan Yasogama, Radjawali, Jakarta.
- Setyodarmodjo, Soenarko H. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintahan*. Airlangga University Press, Jakarta.
- Siedentopf, Heinrich, 1989. *Decentralization for Roral Development: Government Approaches and People's Initiative in Asia The Pacific, Planning and Administration Asia and Pacific Special IULA*, Vol. 16 Number 2.
- Sjahrir & Korten. D.C 1987, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Surjadi, Drs, M.A, Ph.D. 1995, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaya, 1980, *Pengantar Pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agusng Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Terjemahan M. Djauzi Mudzakir, Raja Grafindo Persada, Jakarta.